

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BENTUK PASAR DESA
(Studi Pada Kantor Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

**Diajuakans Sebagai Salah Satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH:

MUH. HADORI

NIM. 2016210125

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Desa Di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya ialah Kantor Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Teknik Pengambilan Data yang dilakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Peneliti menggunakan Teknik Snowball Sampling

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Implementasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar di desa Tlagah sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 terkait peraturan Desa yang mempunyai Hak kebijakan dan Hak tradisi untuk mengatur kepentingan desa dalam aktif berperan mewujudkan cita-cita kemajuan desa serta mempunyai Hak untuk membicarakan rencana-rencana kepentingan kemajuan Desanya sendiri.

Pemimpin merupakan indikator penting dalam berpengaruh baik secara moral, keputusan kerja, keamanan, serta kemajuan organisasi Desa. Kualitas kerja sama secara struktur paling utama tingkatan prestasinya di dalam sebuah organisasi Desa. Kapasitas serta kemampuan memberikan motivasi serta memberi arahan kepada bawahan menjadi salah satu faktor penting dalam efektifnya untuk kemajuan suatu Organisasi Desa. Maka untuk kepekaan menilai, menyeleksi untuk memilih pemimpin yang berkualitas serta mengutamakan kemaslahatan desa, dan apabila dalam organisasi desa dapat melaksanakan perilaku dan teknik tersebut. Maka pada sebuah birokrasi Pemerintah desa, akan ada sebuah kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan kebijakan birokrasi Desa dan pelayanan pada Masyarakat desa, itu tentunya dipengaruhi oleh pemimpin dan pengambil keputusannya melalui pemimpin desa yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Perlunya penyelenggara tata Pemerintahan Desa sangat baik akan terwujudnya, sebaliknya lemahnya pemimpin juga menjadi

faktor salah satu penyebab keruntuhan kinerja birokrasi pemerintah Desa yang ada di Indonesia.

Berkaitan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dengan adanya perubahan yang sudah dilakukan oleh Kepala desa terhadap Masyarakat Desa, maka dengan dipertegas nya tentang kebijakan Desa untuk memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola kepentingan-kepentingan Masyarakat Desa menurut kelebihan Desa masing-masing berdasarkan kondisi Sosial Budaya Masyarakat desa berarti sangat memberi peluang besar agar tumbuh serta berkembang dalam pembangunan Desa serta sesuai kebutuhan Masyarakat Desa dan kondisi sosial budaya dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Maka keadaan Desa yang memiliki kelebihan dalam berkembang sehingga memerlukan perhatian yang sangat penting sesuai terhadap kelebihan potensi desa yang dimiliki Otonomi Desa yang bagus akan berpengaruh terhadap perwujudan kemajuan desa.

Dengan Adanya Kebijakan yang sudah ditetapkan dalam keuangan Dana desa adalah menjadi kewajiban untuk dinilai dengan barang yang dapat berhubungan dengan pelaksanaan Hak kemajuan dan pengembangan Desa dan kewajiban Desa. Maka Kewajiban sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) tersebut bahwa pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Pengelolaan yang ada di Desa merupakan Hak sepenuhnya dikembangkan oleh desa. Dalam pasal (72) ayat ke (1) disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari; pendapatan asli desa Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

Luasnya wilayah dan tingkat geografis desa dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan di dalam Desa juga menjadi faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di dalam daerah atau desa merupakan rangkaian rencana serta agenda dari aparat desa hingga kabupaten atau kota yang memberikan kesepakatan atau kebijakan serta menyetujui rencana itu yang dikonsepsikan secara matang oleh aparat Desa. Oleh sebabnya penyelenggaraan agenda yang dilakukan Pemerintah Desa harus dilakukan secara baik dan teliti agar tercipta desa yang unggul karena merupakan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepala desa beserta stafnya. Masyarakat Desa dan lembaga Desa juga dituntut berpartisipasi berperan dalam proses perencanaan desa serta adanya pengawasan terhadap penyelenggaran pembangunan dan keputusan pemerintah desa. Agar hal itu terwujudkan pemerintah desa perlu transparan dan bertanggung jawab.

Demikian pula banyaknya kelemahan-kelemahan dalam Dana yang ada, yang seharusnya dimanfaat kepentingan desa untuk diberdayakan serta untuk membangun. Terkadang kelemahan biasanya timbul dari permasalahan penyalahgunaan Dana Desa dan penggunaanya tidak sesuai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh ketidakmampuan para Actor Pengelolaan Dana yang melibatkan Aparat Desa yang realitasnya belum maksimal mengelola, mereka yang belum mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk melakukan pengelolaan desa sehingga kemajuan desa belum mencapai sesuai harapan bersama.

Dalam tujuan diluncurkannya Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa oleh kepala desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik secara infrastruktur, ekonomi, dan melaksanakan kegiatan dalam mengentaskan kemiskinan dan terus mendorong kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkecil kesenjangan desa dengan memperkuat penghasilan yang ada di desa dengan bentuk pasar desa.

Dari Observasi penulis, bahwa dalam pengamatan dari fenomena di lapangan penulis, masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Dana Desa yang sudah terealisasi sehingga sebagian masyarakat Desa tidak mengetahui kebijakan yang sudah dilakukan oleh kepala desa terhadap pengelolaan tersebut, padahal pengelolaan Dana desa sudah dilakukan secara tampak, namun kurangnya sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan kepala desa yang sudah direalisasikan ke bentuk pembangunan pasar desa.

Sehubungan dengan hal demikian, maka dalam pelaksanaan Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa harus ada Keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan pembangunan pasar desa dengan adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan yang sudah dilakukan oleh kepala desa. Jika demikian berjalan baik, kemungkinan besar peluang masyarakat untuk membangun desa mencapai kemajuan sesuai harapan dengan Program-program

yang ada, sehingga Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Di Desa Tlagah berjalan dengan semestinya.

Dengan Demikian FenomenaNya yang diAmbil oleh penulis pada latar belakang. Maka peneliti berfokus meneliti, dengan Judul Implementasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Desa Di Kecamatan Banyuates Di Desa Tlagah.

1.2. Rumusan masalah

Dengan Latar Belakang diatas, peneliti lebih tertarik untuk meneliti sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa di kecamatan banyuates desa Tlagah
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam memenuhi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar Desa.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan yang ada di Desa Tlagah dalam mewujudkan Implementasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Desa
2. Mengetahui Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam memenuhi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengetahui lebih realitasnya pengetahuan yang diterima di perkuliahan dengan fakta di lapangan.
- b. Memperperluas serta meningkatkan ilmu, keterampilan dan kreativitas diri dalam bermasyarakat agar mampu mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimilikinya sesuai kompetensi.
- c. Menyiapkan strategi untuk mengembangkan ilmu yang didapat agar mampu mengaplikasikan untuk masyarakat guna menjadi ilmu yang bermanfaat.

2. Bagi Universitas

Untuk mengevaluasi kurikulum yang telah diterapkan, sehingga memberikan pola-pola baru untuk meningkatkan kualitas generasi selanjutnya

3. Bagi Instansi

Sebagai sarana kerja sama antara Pemerintah dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi dimasa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Dunn, William, (2003). *Public Policy Analisis: An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke dua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.*
- Moleong, J. Lexi. 2014. *metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rostadarya.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suaib, Hermanto. 2017. *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat AnImage*
- Grindel, Merille .S (ed). 1980 . *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Nugroho. 2014. *Public Policy Dalam teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Quade E, S. 1984. *Analisis For Public decisions, Elsevier science publishers, now York*.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England
- Edwards III, G. C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

JURNAL

M. Shofiyanto dan kawan-kawan (Dkk) (2015) "*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Banyuates di Kecamatan Banyuates Kabupaten Samapang*". Ekonomi unisma [website : www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id) (email : e.jrm.feunisma@gmail.com) (diakses pada tanggal 9 Februari 2016).

Anwar (2019). "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Siboang Kecamatan Sodol Kabupaten Donggala*". Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako. jurnal implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi dana desadi desa siboang kecamatan sojol (Diakses pada 23 Februari 2019)

Jefri frani rompas (Dkk) "*implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di kecamatan langowan utara kabupaten minahas. Pasca serjana Unsrat. Jurnal Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa DiKecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa* (Diakses pada 21 September 2015)